

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah perang dunia II resmi dinyatakan berakhir, lahir lah Negara – Negara baru khusus nya dikawasan Asia Tenggara. Negara – Negara yang berdiri dengan kesamaan kondisi di satu kesamaan letak geografis. Kesamaan nasib sebagai Negara yang belum memiliki stabilitas Negara nya, serta kesamaan culture budaya menjadikan Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara merasa seperti satu keluarga yang harus saling membantu untuk bisa menemukan stabilitas Negara nya. Kesamaan itu lah yang mendasari dibentuk nya ASEAN sebagai organisasi kawasan. ASEAN dibentuk untuk menghadirkan stabilitas keamanan kawasan, mengingat Negara – Negara di Asia Tenggara merupakan Negara baru yang rentan akan ancaman dan krisis baik dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Salah satu yang melatarbelakangi hadir nya ASEAN ialah untuk membantu menanggulangi konflik dan menciptakan keamanan di kawasan Asia Tenggara, termasuk keamanan dan stabilitas bagi setiap Negara di kawasan Asia Tenggara (Flores, 1997).

Anggota ASEAN adalah Negara – Negara dikawasan Asia Tenggara, dimana salah satu nya adalah Republic of Myanmar yang berhasil merdeka dari jajahan inggris pada tahun 1948. Myanmar memulai perjalanan nya sebagai Negara demokrasi (Kramer, 2012). Namun sayang nya, 14 tahun setelah merdeka, Myanmar mengalami kudeta untuk pertama kalinya yang membuat claim demokrasi yang di nyatakan pada awal berdiri nya Myanmar menjadi tercoreng. Pada 1962, pemerintahan Myanmar digulingkan oleh militer Myanmar untuk pertama kali nya, dan menjadikan militer Myanmar mengambil alih kekuasaan selama hampir 50 tahun.

Myanmar menjadi salah satu Negara di Asia Tenggara yang memiliki kekuatan militer yang kuat bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan militer Negara Negara tetangga. Tak hanya sebagai garda terdepan dalam mengamankan Negara,

militer Myanmar juga menjadi kekuatan politik yang berkuasa di Myanmar. Sejak kudeta dilakukan, militer Myanmar memegang kendali penuh secara politik. Kudeta yang terjadi di Myanmar berawal dari adanya intervensi militer Myanmar yang dipicu karena kondisi social politik Myanmar yang kacau dibawah pimpinan U Nu sejak awal Myanmar merdeka. Hal ini memicu respon dari militer Myanmar yang mendesak U Nu untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di Myanmar dalam waktu dua tahun selain itu juga muncul rasa pesimisme dalam melihat masa depan demokrasi karena sudah banyak nya Negara negara yang mengalami kegagalan demokrasi menurut militer Myanmar. Presiden U Nu dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan di Myanmar dalam waktu dua tahun, sehingga masuknya intervensi militer dan melahirkan kudeta untuk pertama kalinya pada tahun 1962 dan kembali terulang di tahun 2021 lalu setelah dipicu dengan hasil pemilu pada November 2020, dimana pada pemilu itu dinyatakan kekalahan telak militer Myanmar dari pemilu penuh di Myanmar itu. Pihak junta militer Myanmar menuduh adanya kecurangan yang dilakukan KPU Myanmar dalam proses pemilu seutuhnya hari itu. Kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi sorotan dunia internasional, karena menciptakan kekacauan di segala aspek, baik secara ekonomi, secara social, keamanan dan juga stabilitas politik nasional Myanmar dan menyebabkan banyak nya pelanggaran HAM akibat kudeta yang terjadi.

Kasus kudeta yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 akibat hasil pemilu pada 2020 telah menuai berbagai kritik dari berbagai pihak bahkan juga menimbulkan kecaman internasional. Kudeta yang menghampiri Myanmar untuk kesekian kalinya juga turut menyeret ASEAN menjadi perhatian dunia karena persoalan kredibilitas ASEAN dalam menjaga keamanan dan penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara terkhusus nya Myanmar. Pada kudeta Myanmar yang terjadi di tahun 2021, seluruh etnis dan masyarakat sipil Myanmar bersatu untuk melakukan aksi unjuk rasa Sebagai protes atas kudeta yang terjadi di Myanmar. Kudeta yang terjadi di tahun 2021 membuat Myanmar memiliki rapot hitam pelanggaran HAM karena banyak nya korban jiwa yang berjatuh pada aksi demonstrasi. Saat ini, ASEAN Sebagai

organisasi kawasan yang menaungi Negara Negara di kawasan Asia Tenggara tengah melakukan diplomasi untuk memberhentikan kudeta dan juga memulihkan stabilitas politik Myanmar yang didasarkan kepada kesepakatan bersama baik antara pemerintahan militer Myanmar, masyarakat sipil Myanmar dan tokoh tokoh demokrasi di Myanmar agar bisa mencapai stabilitas keamanan dan stabilitas politik nasional.

Kudeta Myanmar telah menjadi fenomena politik Internasional dan hal ini juga turut menjadi persoalan politik dikawasan ASEAN. Persoalan kudeta ini tentu memiliki sebab, dan salah satu sebab yang mendasari terjadinya kudeta yang terus menerus di Myanmar karena tidak adanya pembangunan bangsa yang jelas dan kokoh sejak awal kemerdekaan dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah Negara. Namun, pada kudeta Myanmar pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya tuduhan kecurangan pada pemilu yang dimenangkan oleh partai NLD (Alaudin, 2021). Myanmar menjadi Negara dengan beragam suku dan etnis, hal ini juga turut menjadikan Myanmar menjadi rentan akan konflik, dan juga menciptakan ketidak seimbangan kekuatan politik didalamnya. Sejatinya, apabila dilihat dari kacamata politik Internasional, kekuatan politik seharusnya merupakan hubungan psikologis antara pihak pelaksana dan pihak yang terkena. Dimana, harus ada kesinambungan antara masyarakat dengan pemerintah, juga antara Negara dengan Negara lainnya dalam menjalin kerjasama antar Negara. Namun disisi lain, dalam Politik Internasional khususnya, kekuatan bersenjata merupakan factor material terpenting yang membantu kekuatan politik suatu Negara. Namun, dilain sisi factor material terpenting dari adanya keterlibatan kekuatan bersenjata juga turut menjadi ancaman dari proses mendapatkan kekuasaan dan keberlangsungan hidup pemerintahan suatu Negara. Hal ini disebabkan karena ia merupakan salah satu pondasi dari terciptanya kekuatan politik Nasional. Sehingga, hal ini memudahkan kelompok tersebut untuk mengambil alih kekuasaan bila dirasa memang diharuskan baik secara sah maupun melalui jalur kudeta atau secara paksaan.

Kondisi kudeta yang berlangsung di Myanmar menjadi perhatian khusus yang harus dikawal oleh ASEAN. Karena bagaimanapun proses kudeta yang terjadi di Myanmar membuat tatanan social – politik di ASEAN turut mengalami guncangan, walau tidak berdampak secara langsung. Kudeta yang berlangsung di Myanmar menjadi hambatan besar dalam perwujudan perdamaian bagi Negara Negara di kawasan ASEAN. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diplomasi yang dilakukan ASEAN dalam menanggulangi konflik yang terjadi di Negara di Myanmar pasca kudeta yang dimulai sejak tahun 2020 dan penelitian ini berfokus untuk meneliti dan juga memaparkan diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN terhadap Myanmar pada tahun 2020 – 2021 dalam menanggulangi instabilitas politik di Myanmar.

B. Rumusan Permasalahan

Kondisi Myanmar yang selalu dirundung dengan konflik tentu berdampak kepada ketidak stabilan politik nasional juga menyebabkan catatan hitam dari pelanggaran HAM, yang mengharuskan ASEAN untuk menaruh perhatian khusus kepada Myanmar. Dalam hal ini, ASEAN diharapkan bisa turut mengambil peran untuk mencegah Myanmar menjadi Negara gagal dan membantu Myanmar memiliki demokrasi yang utuh atas Negara nya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti memaparkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan rinci dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses diplomasi ASEAN dalam upaya penanganan konflik Myanmar pasca kudeta?
2. Apa faktor yang mendorong adanya diplomasi ASEAN untuk melakukan upaya penanganan konflik di Myanmar pasca kudeta?
3. Apa dampak yang di hasilkan dari adanya diplomasi ASEAN terhadap penyelesaian konflik pasca kudeta di Myanmar?

Pertanyaan ini mengacu kepada focus dari penelitian ini yang akan membahas mengenai diplomasi ASEAN kepada Myanmar pasca kudeta 2020 – 2021.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah organisasi yang menuangi Negara Negara di kawasan Asia Tenggara dan memiliki prinsip non intervensi, maka diplomasi yang dilakukan ASEAN sebagai respon dari adanya kudeta yang terjadi di tahun 2021. ASEAN telah menerima respon dari masing masing Negara anggota yang juga menjadi salah satu factor pertimbangan ASEAN untuk melakukan diplomasi kepada rezim militer Myanmar. Seperti yang sudah dipaparkan dalam latar belakang dan juga dalam rumusan penelitian, dan melihat dampak dari kudeta di Myanmar pada tahun 2020 sangat besar terutama bagi kawasan ASEAN dan juga dunia internasional, maka peneliti berniat untuk menggambarkan diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN terhadap Myanmar selama 2020 – 2021.

Penelitian ini juga diharapkan bisa menganalisa dampak yang akan dihasilkan dari kudeta Myanmar ditahun 2021, dan juga melihat bagaimana upaya ASEAN dalam memulihkan stabilitas politik di Myanmar menggunakan metode penelitian deskriptif. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu akses untuk melihat bagaimana Myanmar menjalankan fungsinya sebagai sebuah Negara setelah mengalami banyak kegagalan dalam sistem pemerintahannya sampai tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dan juga manfaat dalam aspek teoritis (keilmuan) dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Politik, khususnya pada bidang Politik Internasional. Hal ini diharapkan bisa berguna dengan adanya beberapa pendekatan dan juga metode metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat persoalan konflik di luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara dan juga berguna Sebagai upaya untuk melihat dan memahami bagaimana

stabilitas politik suatu Negara menjadi komponen penting dalam keberlangsungan pertahanan sebuah Negara.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai perkembangan kondisi Negara Myanmar yang ditinjau dari kacamata politik internasional dan juga bisa berguna Sebagai sumbangan pemikiran dalam melihat konflik di dunia Internasional baik dalam kacamata politik sampai kepada kasus kemanusiaan. Selain itu, diharapkan juga bisa memberi kontribusi Sebagai bahan rujukan dan tambahan informasi untuk proses ngajar mengajar dan perkuliahan di jurusan Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menjadi tambahan referensi bagi perumus dan pembuat kebijakan.

